

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus Covid 19 pertama pada Maret 2020 dan hingga saat ini menjadi wabah berkepanjangan yang sudah berjalan lebih dari dua tahun. Pandemi Covid 19 membawa dampak yang cukup meresahkan dari berbagai sektor yang ada di Indonesia, salah satunya yang paling terdampak adalah sektor kesehatan dan perekonomian. Sesuai dengan Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah meluncurkan beberapa program sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul salah satunya melalui program kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dampak dari hal tersebut akan membawa penyesuaian baik dari segi kinerja operasional maupun kinerja keuangan pada beberapa instansi vertikal pemerintah.

Salah satu yang terdampak adalah pada kinerja Rumah Sakit Daerah (RSD) yang dalam hal ini bersinggungan langsung dengan program kesehatan yang dijalankan pemerintah. RSD memiliki kewajiban melakukan kerja sama dengan BPJS sebagai mitra Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara tidak langsung dengan menjalankan program tersebut rumah sakit akan mengubah bentuk

pembayaran dari pengguna jasa kesehatan, perubahan yang dimaksud adalah terkait pola pembiayaan yang saat ini menggunakan kartu asuransi kesehatan. Penggunaan kartu asuransi kesehatan juga disebut sebagai pembiayaan secara tidak langsung atau dilakukan oleh pihak ketiga. Perubahan tersebut didukung dengan pemberlakuan sistem *Indonesia Case Based Groups* (INA-CBG's) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam peraturan tersebut BPJS memiliki standar tarif pelayanan kesehatan yang diberlakukan untuk seluruh pasien pengguna kartu asuransi kesehatan. Sistem INA-CBG's merupakan model pengajuan klaim terkait dengan penggantian biaya yang dikeluarkan rumah sakit, sistem penggantian biaya dilakukan dengan sistem paket yang didasarkan oleh jenis penyakit pasien. Dalam INA-CBG's tarif pelayanan kesehatan memiliki perbedaan dengan tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit sehingga sebagai respon atas pemberlakuan sistem tersebut akan muncul piutang yang harus ditagihkan oleh rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pengobatan serta pelayanan kesehatan rumah sakit terhadap pasien. Pada masa pandemi ini, pengguna layanan kesehatan meningkat pesat tetapi tidak sebanding dengan kemampuan membayarnya sehingga atas hal tersebut menimbulkan berbagai macam risiko pada finansial rumah sakit. Dampaknya terhadap pengelolaan piutang rumah sakit yang salah satunya berasal dari program BPJS akan mengalami penyesuaian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 terkait program Relaksasi Iuran BPJS yang berlaku selama enam bulan sejak iuran periode Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021,

juga akan berpengaruh pada pengelolaan piutang rumah sakit yang berasal dari BPJS.

Berdasarkan berbagai masalah yang menjalar dalam kinerja keuangan rumah sakit dan mengacu pada PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, pengelolaan rumah sakit memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Badan Layanan Umum (BLU). Dalam rangka mewujudkan *mandatory* tersebut, maka dilakukan berbagai pendekatan seperti pemberlakuan Pengawasan Intern yang dituangkan dalam sistem khusus yaitu sistem pengendalian intern di bawah unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) rumah sakit. Dengan kata lain rumah sakit diharuskan memiliki sistem pengendalian intern yang menjadi kontrol atas risiko-risiko yang ada.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang terstruktur dan terorganisir memiliki fungsi antara lain untuk menjaga keseimbangan organisasi, memastikan ketelitian dan keandalan informasi akuntansi, mendorong efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan atas kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi manajemen dalam merancang suatu sistem pengendalian intern (Hamel, 2013). Landasan tersebut tentunya berlaku dalam kebijakan yang ada di rumah sakit daerah. Berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.05/2020, fungsi SPI tidak terbatas hanya dalam memberikan keyakinan memadai. Dalam hal untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi tidak cukup hanya dengan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, melainkan juga diperlukan kepastian dalam hal keandalan informasi, pengamanan, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Pendekatan sistematis

juga dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi dan peningkatan efektivitas pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi sehingga melalui pendekatan dengan kepastian tersebut tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional pada organisasi dapat terpenuhi.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui seberapa pentingnya sistem pengendalian intern terutama dalam pengelolaan keuangan rumah sakit sehingga sistem pengendalian intern menjadi alat utama yang dapat mendukung tercapainya standar pelayanan rumah sakit dalam setiap aspek kegiatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain itu hadirnya PMK 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum yang telah dicabut dengan PMK 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum memberikan kesempatan untuk melakukan optimalisasi peran unit SPI.

Kegiatan sistem pengendalian intern yang berfokus pada keuangan rumah sakit terlebih pada bagian piutang rumah sakit yang mengalami tekanan dari penyesuaian-penyesuaian yang ada akibat pandemi Covid 19, akan membantu menelaah beragam risiko atas gagal bayar atau risiko finansial rumah sakit lainnya terkait piutang BPJS. Sistem pengendalian intern yang efektif berdasarkan *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Framework* memiliki lima komponen antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Subaidah, 2020). Kelima komponen ini digunakan sebagai instrumen untuk menilai pengendalian intern yang efektif pada berbagai entitas salah satunya pada rumah sakit.

Berdasarkan paparan dan permasalahan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut sehingga akan menjadi bahasan utama dalam penugasan KTTA yang dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna Mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi. KTTA ini akan berfokus pada Sistem Pengendalian Intern pada Piutang Rumah Sakit sesuai dengan judul KTTA yaitu “TINJAUAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG BPJS KESEHATAN PADA RSD BALUNG DI MASA PANDEMI COVID 19”. Tinjauan ini dilakukan dari perspektif audit operasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang Karya Tulis Tugas Akhir, dapat dijabarkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana kesesuaian penerapan sistem pengendalian intern piutang BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh RSD Balung dengan *COSO Framework*?
2. Apa saja potensi risiko dalam Sistem Pengendalian Intern piutang BPJS Kesehatan pada RSD Balung di masa Pandemi Covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan karya tulis tugas akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern piutang di RSD Balung, terutama piutang rumah sakit yang berasal dari BPJS Kesehatan dalam kurun waktu pandemi covid 19. Dengan melakukan tinjauan dan evaluasi pengendalian intern piutang di RSD Balung dari perspektif audit, maka teknik yang digunakan dalam melakukan analisis dan olah data, yaitu membandingkan antara pengendalian intern yang ditetapkan oleh

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dengan kondisi riil yang terjadi di RSD Balung yang berlokasi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada penulisan KTTA ini merupakan karya tulis pada disiplin ilmu audit khususnya audit operasional pada sektor publik, dalam hal ini adalah Badan Layanan Umum berupa Rumah Sakit Daerah. Selain itu, pada karya tulis tugas akhir ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada Sistem Pengendalian Intern terkait pengelolaan piutang BPJS Kesehatan yang dilakukan RSD Balung.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis melalui penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Menjadi bahan literasi secara konseptual dan informasi bagi penulisan dan penelitian lain terkait penerapan sistem pengendalian intern piutang dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Mampu menerapkan konsep dan teori dari pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan terkait audit khususnya dalam lingkup sistem pengendalian intern, serta menambah pengalaman penulis dalam melakukan tinjauan sistem pengendalian intern piutang secara langsung di lapangan.

b. Bagi RSD Balung

Menjadi bahan evaluasi dan informasi tambahan untuk pengambilan keputusan, serta dapat memberikan masukan dan pemahaman tentang kondisi sistem pengendalian intern piutang yang berasal dari BPJS Kesehatan pada RSD Balung.

c. Bagi pembaca

Mampu memberikan informasi, menambah wawasan dan pemahaman terkait pandangan mengenai sistem pengendalian intern piutang BPJS Kesehatan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sebagai bentuk informasi yang digunakan untuk menggiring pembaca kepada isi dari penulisan karya tulis tugas akhir. Selanjutnya, penulis juga memaparkan pembatasan masalah, manfaat penulisan, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Hal tersebut memiliki tujuan untuk membatasi pembahasan terkait penulisan dan memberikan informasi mengenai sistematika penulisan bahwa pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara ilmiah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan penulis sebagai acuan untuk menulis pembahasan topik dalam penyusunan karya tulis tugas akhir. Landasan teori ini berasal dari studi kepustakaan di antaranya buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan terkait dan relevan. Sementara itu, rincian yang dipaparkan pada bab ini yaitu seputar teori-teori sistem pengendalian intern baik secara umum maupun secara khusus berkenaan dengan piutang rumah sakit. Landasan terkait

rumah sakit dan BPJS Kesehatan, serta berkaitan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan lingkup penulisan karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dari penulis mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dan data-data yang berasal dari objek penulisan karya tulis tugas akhir. Selain itu, terdapat juga pemaparan penulis terkait hasil perbandingan teori berdasarkan landasan teori pada Bab II dengan hasil yang penulis peroleh di lapangan. Rencana pemaparan pada bab ini melibatkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, ulasan terkait objek penulisan dan unit pengendalian intern khususnya di bagian keuangan, serta pemaparan terkait pembahasan hasil berdasarkan rumusan masalah dan dilengkapi dengan uraian rekomendasi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis yang merupakan ringkasan dari pembahasan pada bab sebelumnya. Di samping itu, terdapat rekomendasi penulis yang ditujukan kepada pemangku kebijakan di RSD Balung yang berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern piutang BPJS Kesehatan.